

EVALUASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN PADA MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

Thesar Yusta Wira Pradata

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Education is an obligation that must be implemented by every citizen of a country without having to look at the status of social strata, rich or poor so the government as the implementers of education in a region should be able to provide best execution for all citizen. for example. A child who came from poor families complete the 12 years of compulsory education or graduated from high school or vocation school. With highly educated then it can improve enhance mutual city of Surabaya with other region. But not all communities can feel the city of Surabaya the before , the government is sued a regulation governing mayor on education. The study aims to describe how evaluation and impact that occur at the time the regulations with have been legalized mayor is carried on in the poor in villages wonokusumo. The research using qualitative methods. The determination of the core informans using purposive sampling method ang then combine the technique of purposive sampling and snowball technique. Provide minimal education in order ti develop theie potensial and the last to continue to persue higher degrees. With 3 very visible impact of these can help children of compulsory school age to 12 years to achieve his goals to improve the condition of his family towards a better.

Keywords : *Evaluation, impact, education, compulsory 12 years, poor families*

Pendahuluan

Pendidikan bermutu dan berkualitas pada saat ini sangatlah dibutuhkan bagi perkembangan setiap individu di seluruh dunia, yang mana dewasa ini kita melihat setiap negara mulai berlomba – lomba untuk merencanakan pendidikan yang tinggi bagi setiap warganya. Dengan pendidikan yang baik maka sebuah bangsa didalamnya secara otomatis mulai membangun dan mendidik masyarakatnya kearah yang berkompeten dan juga melalui pendidikan negara mencoba untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas, dengan kata lain dapat bersaing secara kompeten dengan warga negara lain. Di era globalisasi ini pembangunan adalah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh setiap Negara atau bangsa yang ingin menunjukkan eksistensinya dalam percaturan dinamika globalisasi saat ini. Dalam hal ini pembangunan yang menjadi syarat mutlak ialah pembangunan manusia yang memiliki tingkat kompetisi tinggi, daya saing dan memiliki wawasan yang luas ialah pembangunan manusia melalui pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia sejak tahun 2013 merintis program pendidikan menengah universal atau pendidikan 12 tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2025 dan untuk mendukung program ini, pemerintah membutuhkan anggaran Rp 25 triliun agar program wajib belajar ini bisa dilaksanakan secara gratis (M. Yunus, Tempo 2012). Meski telah ada berbagai program pemerintah yang

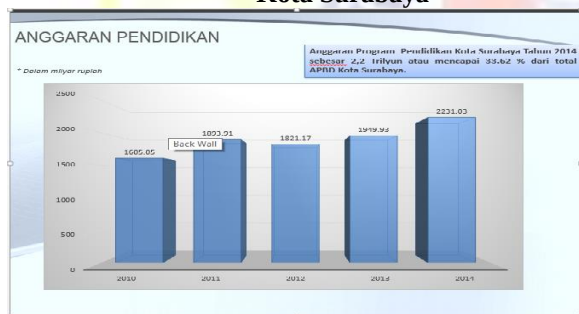
telah dilaksanakan seperti wajib belajar 12 tahun, akan tetapi masih ada saja warga atau masyarakat yang tidak mendapatkan akses atau pelayanan pendidikan yang seharusnya dan juga beberapa daerah yang masih belum memberlakukan wajib belajar 12 tahun. Padahal anggaran alokasi pendidikan nasional sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 31 yang mengamanatkan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya sebesar 20 % dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Akan tetapi dengan telah diaturnya minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%, baik APBN maupun APBD di kabupaten kota tidak berdampak besar bagi pendidikan di beberapa daerah terpencil dan sulit terjangkau. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara di berbagai tingkatan / jenjang pendidikan yaitu SD yang berusia enam sampai dua belas tahun (6 – 12), SMP dua belas sampai lima belas tahun (12 – 15), dan yang terakhir jenjang SMA / SMK lima belas sampai delapan belas tahun (15 – 18). Hal ini terlihat dari jumlah pagu anggaran yang setiap tahunnya terus meningkat, dapat terlihat dari

APBN 2009 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 208,2 triliun dan meningkat pesat pada kurun waktu 4 tahun anggaran pendidikan direncanakan yaitu. Pada RAPBN tahun 2011 anggaran pendidikan telah mencapai Rp266,9 triliun. Pada RAPBN Tahun 2012 meningkat menjadi Rp310,8 triliun dan tahun 2013 meningkat 59 % atau 123 triliun pada RAPBN 2013 menjadi Rp 331,8 triliun (Seknas Fitra).

Sedangkan untuk Surabaya sendiri yang menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Dan menjadi acuan atau tolak ukur pendidikan nasional, dengan anggaran pendidikan Surabaya, lanjut Risma sejak 2012 mencapai 36 persen. Ini anggaran murni untuk sektor pendidikan. Tidak termasuk gaji guru. Yang jelas total anggaran pendidikan adalah 36 persen dari total APBD kita sebanyak 5,4 triliun (Tribunnews).

Grafik Persentase Anggaran Pendidikan Kota Surabaya



Dengan anggaran pendidikan yang sebesar ini dan mencapai lebih 30% seharusnya dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh Kota Surabaya. Akan tetapi dengan anggaran yang besar belum tentu pendidikan di Kota Surabaya menjadi lebih baik, malah kenyataan di lapangan berbeda ada sebagian wilayah di Kota Surabaya yang masih tidak dapat mengakses pendidikan secara penuh, dan hampir seluruhnya yang tidak dapat mengakses pendidikan ialah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Surabaya utara yang berbatasan langsung dengan pulau madura. Walaupun masih ada di daerah lain dan hanya sedikit.

Meskipun Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (DISPENDIK) Kota Surabaya telah banyak melaksanakan berbagai program dan kebijakan mengenai pendidikan, namun terbukti bahwa apa yang dilakukan Dinas pendidikan Kota Surabaya masih belum bisa mengatasi masalah pendidikan yang terjadi di Surabaya. Dikarenakan berbagai alasan yang mempengaruhi diantaranya, yaitu :

Persentase penduduk yang Tidak/Belum pernah sekolah/ tidak bersekolah lagi menurut alasan Tidak/Belum pernah sekolah/ tidak bersekolah lagi di Kota Surabaya

Alasan tidak / belum pernah sekolah / tidak bersekolah lagi	Persentase
(1)	(2)
Tidak ada biaya	43,91
Bekerja / Mencari nafkah	12,51
Menikah / Mengurus RT	5,32
Merasa pendidikan cukup	5,71
Malu karena ekonomi	1,07
Sekolah Jauh	3,22
Cacat	22,79
Menunggu pengumuman	1,35
Tidak diterima	0,42
Lainya	23,69
Jumlah	100,00

Sumber : Data diolah dari Dispendik Kota Surabaya “ Buku Laporan Tahunan 2014 “

Penjelasan statistik diatas mungkin merupakan gambaran yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi upaya yang dilaksanakan dan dirancang untuk mengatasi masalah seakan – akan tidak berjalan efektif jika dilihat kembali pada tabel diatas . Akibatnya, program mengenai pendidikan terutama Wajar 12 tahun selalu tidak terealisasi dengan baik yang disebabkan keadaan dan kondisi yang terjadi di masyarakat Surabaya, Misalnya saja jumlah keluarga miskin (gakin) / masyarakat miskin yang berada di daerah Surabaya yang relative banyak. Dalam hal ini permasalahan yang muncul terutama ialah masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Surabaya. saat ini adalah bahwa masyarakat miskin

yang berada di Kota Surabaya masih lumayan banyak. Dimana hampir setiap kecamatan yang berda di Kota Surabaya terdapat jumlah keluarga miskin (GAKIN). Dimana masyarakat misin tersebut membawa berbagai dampak yang besar bagi Kota Surabaya khususnya pada bidang pendidikan, dimana dengan banyaknya masyarakat miskin maka persoalan besar akan dihadapi oleh pemerintah. Misalnya pada Kecamatan semampir memiliki beberapa kelurahan yaitu Ampel, Sidotopo, Pegirian, Wonokusumo, Ujung. Untuk lebih mengetahui jumlah secara rinci penduduk miskin di Kecamatan Semampir maka kami sajikan tabel berikut dibawah ini :

Angka Keluarga Miskin Di Seluruh Kelurahan Dalam Kecamatan Semampir (per keluarga

	KELURAHAN	2013	2014
1.	Ampel	1.129	906
2.	Sidotopo	3.371	4.937
3.	Pegirian	3.154	3.561
4.	Wonokusumo	4.373	5.887
5.	Ujung	4.379	5.176

Sumber : Kecamatan semampir dalam angka 2013 dan 2014

Dari data kemiskinan diatas yang telah tersaji di seluruh Kelurahan yang berada di Kecamatan Semampir sangat terlihat betapa banyaknya jumlah keluarga miskin yang setiap Kelurahan jumlahnya mencapai ribuan.

Di seluruh Surabaya yang mana dijelaskan oleh BPS batas kemiskinan ialah 2100 per kalori untuk pengeluaran kebutuhan sehari – harinya / sekitar

200.000 perbulan untuk wilayah Surabaya pada tahun 2012. Pendapatan sebesar itu tentunya hanya ‘ cukup ‘ untuk memenuhi kebutuhan ‘ sangat dasar ‘. Mengingat standart yang ditetapkan pemerintah Indonesia secara nasional tentang penduduk miskin begitu rendah, sehingga akses penduduk miskin dan kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak menjadi semakin sempit, karena sangat kecilnya

pendapatan mereka, dan pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari – hari mereka. Terlebih masyarakat menganggap bahwa pendidikan di Indonesia itu mahal, padahal banyak sekali beasiswa yang ada dan juga beberapa kota, misalnya Kota Surabaya telah mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun. Bilamana ada penduduk miskin maka biaya pendidikannya akan gratis di jenjang SD, SMP, SMA (semua negeri).

Daerah Kecamatan Semampir ini dipilih, karena selama bertahun – tahun adalah daerah yang banyak sekali bermukim penduduk pendatang atau asli pulau Madura atau keturunan Madura yang tinggal, dan menetap selama bertahun - tahun di Kecamatan semampir. Penduduk Madura tersebut kebanyakan dan hampir semua tingkat pendidikannya sangatlah rendah atau kurang, akan tetapi masih ada sebagian yang telah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misal lulus SD, SMP, SMA dan UNIVERSITAS. Dengan adanya hal seperti itu maka masalah yang semakin kompleks akan datang silih berganti, apalagi dengan sebagian besar penduduk wilayah kecamatan semampir yang terindikasi masih kurang mendapat pendidikan Wajib 12 tahun bagi SD, SMP, SMA. Dalam program wajar 12 tahun yang dilaksanakan Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah berusaha semaksimal mungkin untuk warga Surabaya yang belum sekolah (usia 6 – 12 jenjang SD), (usia 12 – 15 jenjang SMP), (15 – 18 jenjang SMA) maupun yang putus sekolah untuk mengikuti wajib belajar 12 tahun. Akan tetapi masih ada saja warga surabaya yang masih enggan, dikarenakan banyak factor dan alasan dari warga.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah kami kemukakan dan jelaskan tersebut, maka perumusan masalahnya ialah Bagaimana evaluasi program wajib belajar 12 tahun (studi kasus pada masyarakat miskin Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, secara umum penelitian ini bertujuan :

- Untuk mendeskripsikan evaluasi program Wajib Belajar 12 Tahun (Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya).
- Untuk mendeskripsikan permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Surabaya, yaitu pada pelaksanaan perwali no 47 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan khusus pada program wajib belajar 12 tahun pada masyarakat miskin. Dikarenakan masalah pendidikan ialah masalah yang sangat penting bagi kemajuan warga Kota Surabaya,

yang mana ingin diselesaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya terutama pada pendidikan untuk masyarakat miskin. Melalui pendidikan pula kita dapat meningkatkan taraf hidup seseorang, yang mana taraf hidup seseorang akan berubah bilamana tingkatan jenjang pendidikan mereka semakin tinggi, dan itu secara sendirinya akan memacu seseorang untuk merubah taraf hidup yang rendah ke arah yang semakin baik. Melalui penelitian ini semoga saja, dapat mengatasi masalah anak yang belum sekolah, putus sekolah, dan apa alasan mereka kenapa harus meninggalkan sekolah atau putus sekolah. Bilamana hal tersebut terjadi maka penelitian ini dapat menjadi arah dan focus dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan sekaligus dapat mencari apa yang dibutuhkan masyarakat mengenai pendidikan wajar 12 tahun tersebut.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi informasi kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dimana dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya semenjak di pimpin oleh Ibu Tri Risma Maharani memiliki kebijakan bahwa setiap anak di Kota Surabaya wajib sekolah, walaupun ia berasal dari keluarga tidak mampu. Dan juga memberikan saran yang terbaik bagi pemerintah. Penelitian tentang evaluasi program wajib belajar 12 tahun (studi kasus pada masyarakat miskin di Kecamatan Semampir Kota Surabaya), dimana ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang seberapa besar peran Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi masalah – masalah pendidikan di Surabaya dalam hal pelaksanaan perwali no 47 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (khusus program wajib belajar 12 tahun pada masyarakat miskin). Dikarenakan masyarakat miskin sangat membutuhkan akses pendidikan yang luas untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dan sekaligus menjalankan amanat Undang – Undang Dasar 1945 dalam hal pendidikan.

Tinjauan Pustaka

1.Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi menurut Ralph Tyler dalam Suharsimi (2003, h.3) mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai dan juga menurut Cronbach dan Stufflebeam tambahan definisi tersebut adalah proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Sedangkan menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2012, h.185) evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian – sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan

dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Sedangkan Triana (2011, h.271) Akan tetapi dalam studi evaluasi indikator – indikator proses, output dan outcome lebih dekat atau lebih dikenal membahas mengenai evaluasi proses, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif.

- Evaluasi Proses ialah pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. Pada tahap ini menurut Palumbo diperlukan dua kali evaluasi, yaitu :
 - a. Evaluasi Desain Kebijakan, untuk menilai apakah alternative – alternative yang dipilih sudah merupakan alternative yang paling hemat dengan mengukur hubungan antar biaya dengan manfaat (cost benefit –analysis), dll yang bersifat rasional dan terukur
 - b. Evaluasi Legitimasi Kebijakan, untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau kelompok program oleh masyarakat / stakeholder / kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut
 - Evaluasi Formatif ialah evaluasi yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung yang tujuannya utamanya untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi – kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilan
- Evaluasi Sumatif yang dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikand dampak, tujuan evaluasi sumatif ini adalah untuk mengukur bagaimana efektifitas kebijakan / program tersebut memberi dampak yang nyata pada problem yang ditangani.

2. Dampak Kebijakan

Evaluasi dampak lebih mengarah kepada sampai sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki (intended impact). Riset pada evaluasi dampak bertujuan untuk menguji efektifitas suatu kebijakan atau program dalam pencapaian tujuan kebijakan. Apakah kebijakan atau program menyebabkan perubahan sesuai dengan yang diinginkan atau justru sebaliknya? Suatu kebijakan atau program dikatakan memiliki dampak manakala kebijakan atau program tadi dapat mencapai perubahan kea rah tujuan dan sasaran yang dikehendaki (Widodo, 2007.hal 120).

3. Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Pendidikan ialah suatu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang akan menjadi bekal hidupnya esok di kemudian hari. Dengan adanya pendidikan maka taraf hidup seseorang akan menjadi lebih baik, yang sebelumnya

tidak mengenal apa – apa, dengan pendidikan maka ia akan belajar untuk memahami dan mengerti apa yang dipelajarinya. Menurut Theodore Brameld Istilah pendidikan mengandung fungsi yang luas dari pemelihara dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baru mengenal tanggung jawab bersama di dalam masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Di dalam masyarakat yang kompleks, fungsi pendidikan ini mengalami spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yang senantiasa tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal di luar sekolah

4. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin menurut pendapat saya ialah masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dimana dengan terpenuhinya 3 kebutuhan pokok tersebut maka masyarakat atau manusia disebut masyarakat mampu. Akan tetapi walaupun terpenuhinya 3 pokok tersebut, belum tentu masyarakat tersebut adalah masyarakat yang mampu / terpenuhi kebutuhannya, bisa saja masyarakat tersebut tidak mampu. Dikarenakan jumlah pendapatannya kurang dan tidak mencukupi kebutuhannya sehari – hari.

Sedangkan Menurut Friedman dalam Karnaji dan Suyanto (2005, hal.2), kemiskinan adalah “ ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan social “. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan itu menurut Friedman meliputi hal – hal berikut. Pertama, modal produktif atas asset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi social dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama seperti koperasi. Keempat, network atau jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang – barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Kelima, informasi – informasi yang berguna untuk kehidupan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penggunaan metode ini ialah penerapannya yang tergantung pada research question yang telah ditentukan, dan dengan metode penelitian kualitatif ini pengungkapan suatu fenomena sosial adalah suatu yang mutlak dan harus ditemukan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di kawasan yang tingkat kemiskinanya sangatlah tinggi yaitu Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel menggunakan purposive sampling, dengan purposive sampling ini kita dapat

mengetahui variasi – variasi atau elemen – elemen yang ingin diwaancarai. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penelitian ini ialah membandingkan antara data sekunder dan primer dan lalu di analisis secara baik dengan mengumpulkan data, reduksi data dan penyajian data lalu membuat penarikan kesimpulan sesuai dengan tahapan - tahapan yang dilaksanakan.

Pembahasan dan Hasil

1. Pemahaman tentang Perwali No 47 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (khusus program wajib belajar 12 tahun) pada masyarakat miskin.

Berdasarkan tugas pokok fungsi dan tujuan Perwali No 47 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya yang tertera pada pasal 13 yang berbunyi :

- a. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Kota Surabaya.
- b. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Kota Surabaya untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

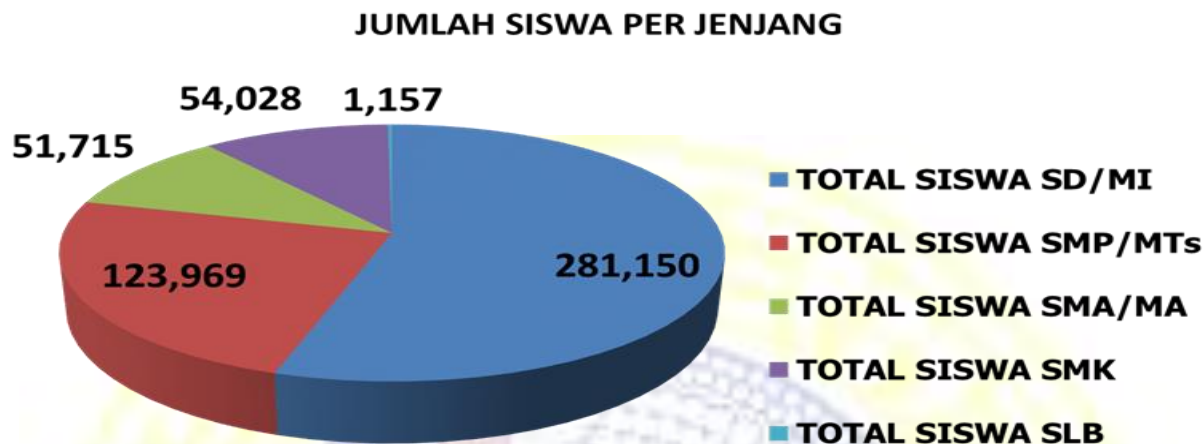
Penjelasan awal diatas merupakan tujuan utama dari perwali ini, yang mana mewajibkan seluruh lapisan masyarakat terutama pada masyarakat miskin. Peraturan ini merupakan suatu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh walikota yang membahas mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya. Dalam peraturan walikota ini didalamnya mengatur mengenai penyusunan rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan salah satu programnya ialah wajib belajar 12 tahun. Dengan adanya perwali dan sekaligus program ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah – masalah di dunia

pendidikan, terutama untuk mengakomodir pendidikan bagi masyarakat miskin, mengapa masyarakat miskin ?. dikarenakan masyarakat miskin sangat perlu untuk mendapat akses pendidikan yang pasti dari pemerintah serta kemudahan dan kebutuhan untuk mendukung proses pendidikan yang sedang dilaksanakan. Dalam hal ini dengan adanya wajib belajar 12 tahun bagi seluruh siswa di Kota Surabaya, maka ini membuka sedikit pintu pendidikan untuk dapat diakses oleh warga miskin atau masyarakat miskin yang sangat membutuhkan pendidikan.

2. Pemahaman Khusus Tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun Pada Masyarakat Miskin

Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki berbagai macam prestasi Adipura, Kalpataru, Adiwiyata, dan masih banyak berbagai penghargaan lain yang didapatkan. Sedangkan untuk penghargaan pendidikan kota peduli pendidikan dan penghargaan kota bebas buta aksara. Dari berbagai penghargaan tersebut Kota Surabaya menjadi jujukan atau percontohan daerah – daerah atau kabupaten dan kota lain yang ingin maju dan berkembang. Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota yang telah menerapkan program nasional wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, telah menjadi kota percontohan wajib belajar 12 tahun bagi kota – kota lain di Indonesia. Kota Surabaya dijadikan contoh dikarenakan lancarnya dan suksesnya program tersebut. Oleh sebab itu di dalam pendidikan Kota Surabaya tidak ada anak yang tidak boleh sekolah, semua warga Kota Surabaya diwajibkan untuk menuntaskan wajib belajar supaya dengan menuntaskan wajib belajar tersebut maka secara otomatis akan meningkatkan taraf hidup mereka. Terutama masyarakat miskin,, berikut ialah persentase jumlah siswa tiap jenjang di Kota Surabaya.

**Gambar Diagram
Jumlah Persentase Siswa
Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2014**



3. Dampak Program Wajib Belajar 12 Tahun (Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin)

Peraturan walikota no 47 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya (khususnya program wajib belajar 12 tahun) pada masyarakat miskin adalah suatu peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pendidikan di Kota Surabaya. Dengan diterbitkannya perwali ini sebagai landasan hukum maka pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk memperluas dan meratakan pendidikan di berbagai pelosok Kota Surabaya, yang salah satunya ialah menjangkau wilayah yang tingkat kemiskinannya relatif tinggi yaitu Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir. Berdasarkan perihal diatas supaya keluarga miskin atau masyarakat miskin dapat terjangkau akses pendidikan maka terbitlah peraturan walikota ini yang dipergunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Dengan adanya peraturan walikota ini maka membuka akses seluas – luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, tidak terkecuali masyarakat miskin yang menjadi target dalam pelaksanaannya. Hal ini berdampak pada anak – anak yang berasal dari keluarga miskin dapat meraih pendidikan yang tinggi dan juga sekaligus mendapatkan kehidupan yang baik, yang mana dengan berpendidikan tinggi mereka akan siap untuk hidup mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat sekitar mereka. Lebih lanjut, berikut akan dibahas satu persatu mengenai tujuan dari peraturan walikota no 47 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya khusus program wajib belajar 12 tahun pada masyarakat miskin yang mana menjadi landasan

telah berjalannya peraturan walikota ini sesuai dengan tujuan dalam peraturan walikota.

Dalam menjelaskan secara lebih rinci mengenai dampak perwali ini yang berdasarkan tujuan perwali tersebut, berikut akan disampaikan mengenai subbab – subbab tujuan peraturan walikota yang menjadi landasan dari dampak peraturan walikota diatas yang meliputi perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Kota Surabaya, mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat,, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

a. Perluasan dan Pemerataan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Siswa Yang Berasal dari Masyarakat Miskin di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya di bidang pendidikan yang telah tercantum dalam Perwali No 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, proses selanjutnya setelah penyusunan ialah pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang telah tercantum dalam Perwali No 47 tahun 2013. Dimana dalam proses perencanaan pelaksanaan perwali melibatkan berbagai stakeholder khususnya di bidang pendidikan Kota Surabaya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu masyarakat, guru, ahli pendidikan dll. Dimana dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik,, maka akan menghasilkan dampak yang baik pula. Salah satunya ialah dampak dari adanya peraturan walikota no 47 tahun 2013

tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya ialah akses perluasan pendidikan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat. Apabila perluasan pendidikan berjalan baik, maka hal ini disebabkan perencanaan dan pelaksanaannya yang benar – benar matang. Yang mana dalam perencanaannya pemerintah Kota Surabaya telah merumuskan apa yang terbaik baik kemajuan pendidikan di Kota Surabaya. Salah satu usahanya untuk kemajuan pendidikan di Kota Surabaya adalah menentukan hal – hal prioritas seperti halnya pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, dimana dalam penjelasan dari wawancara di bab sebelumnya Perwali No 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan pasal 16 telah mengatur bahwa “ Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima biaya operasional pendidikan daerah dari pemerintah daerah tidak diperkenankan membebani biaya apapun kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin “. Dari sini telah terlihat jelas bahwa pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dalam hal pembiayaan bagi masyarakat miskin, dan telah memprioritaskan masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu atau keluarga miskin untuk dapat merasakan akses pendidikan setinggi – tingginya sampai dengan lulus SMA atau sampai melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Mengembangkan Potensi Diri Agar Dapat Hidup Mandiri di Dalam Masyarakat

Program wajib belajar 12 tahun yang sedang dilaksanakan di Kota Surabaya. Dapat dilihat bahwa setelah adanya perwali no 47 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan mewajibkan pendidikan wajib belajar bagi warganya, yang mana wajib belajar 12 tahun merupakan keberlanjutan dari wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 12 tahun ini diberlakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, terutama masyarakat yang berusia jenjang sekolah atau sedang menempuh pendidikan sampai lulus SMA. Berdasarkan dari data yang diperoleh selama penelitian dan juga data yang diperoleh melalui dinas terkait, dapat diketahui bahwa siswa atau siswi di Kota Surabaya yang berhasil dalam menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun hampir semua memiliki pemikiran yang dewasa dan jauh atau dapat dikatakan lain mereka bersekolah tinggi ini bertujuan untuk dapat hidup mandiri, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan yang terakhir ialah dapat membahagiakan kedua orang tua mereka, yang selama ini bekerja keras membanting tulang demi kelangsungan pendidikan anaknya. Berikut sedikit data mengenai hasil lulusan wajib belajar 12 tahun, yang langsung bekerja dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi berikut tabel persentase lulusan:

Tabel
Persentase Lulusan Wajib Belajar 12 Tahun (SMK)
Yang dan Bekerja

Indikator Sasaran	Sub Indikator Sasaran	Jenjang	Capaian 2009	2010	2011	2012	2013	2014
Siswa SMK yang diterima bekerja	Lap Kerja. Mandiri	SMK	15 %	15 %	15 %	17 %	17 %	20 %
	Lap Kerja. Industri	SMK	47 %	50 %	55 %	57 %	60 %	65 %

Sumber : Data Diolah dari Dokumen Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Berdasarkan temuan data dilapangan mengenai persentase hasil setelah selesai menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun secara keseluruhan di Kota Surabaya. Dapat dilihat bahwa dari lulusan SMA/MA/SMK, lulusan SMK lebih dapat hidup mandiri, dengan kata lain setelah mereka lulus, mereka langsung mendaftar dan bekerja di perusahaan – perusahaan mandiri maupun perusahaan industry kecil atau besar, dan jika ditelaah kembali lulusan – lulusan SMK dicetak untuk siap di dunia bekerja. Dari data yang ditemukan sekolah – sekolah SMK mulai diminati, karena setelah lulus para lulusanya bisa langsung bekerja, yang mana dari lulusan tersebut persentase yang bekerja terus meningkat dan pada tahun 2010 mencapai 50 %, 2011 mencapai 55 %, 2012 mencapai 57 %, 2013 mencapai 60 %, dan terakhir 2014 yang mencapai 65 %.

Sedangkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) / (MA) lebih banyak lulusan yang meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu melanjutkan studinya ke universitas – universitas yang dituju sesuai dengan fakultas yang diinginkan. Akan tetapi para lulusan SMA yang berminat ke universitas harus berusaha semaksimal mungkin untuck lolos dalam seleksi nasional yang diadakan. Yang mana para siswa – siswi yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari tahun 2010 mencapai angka 65 %, 2011 mencapai 70 %, 2012 mencapai 75 %, 2013 mencapai 80 %, dan yang tertinggi tahun 2014 mencapai 85 %. Dan mungkin angka persentase tersebut akan terus naik setiap tahunnya. Dari pendataan dan penelitian yang kami laksanakan dan fokuskan

pada pendidikan anak – anak yang berasal dari keluarga miskin Kelurahan Wonokusumo. Ternyata memang terbukti bahwa anak – anak yang berasal dari keluarga miskin lebih memilih bekerja setelah menuntaskan pendidikannya selama 1 tahun.

c. Melanjutkan Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi

Mengembangkan potensi diri dan dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah sesuatu yang diharapkan, dicita – citakan oleh setiap individu manusia untuk dapat hidup dan melaksanakan segala yang diinginkan. Seperti yang telah disajikan dengan data – data diatas, dapat dilihat secara umum bahwa gambaran diatas telah mengindikasikan keseriusan pemerintah Kota Surabaya untuk dapat memberikan akses pendidikan yang seluas – seluasnya bagi masyarakat di wilayah Kota Surabaya. Pendidikan itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk dalam inventasi yang paling dasar untuk perkembangan masa depan, bilamana setiap masyarakat berfikir untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maa secara otomatis masyarakat tersebut telah berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Dewasa ini masyarakat telah semakin sadar bahwa pendidikan adalah prioritas utama untuk meraih masa depan yang lebih baik dan juga berfungsi sebagai modal dasar untuk dapat bersaing di era globalisasi ini. Akan tetapi bila seseorang atau masyarakat ingin meraih pendidikan setinggi – tingginya, mereka harus memiliki rasa semangat dan motivasi untuk dapat bersekolah sampai jenjang yang tinggi, percuma saja pemerintah menyelenggarakan pendidikan tanpa memungut biaya / gratis bilamana tidak ada

semangat dan motivasi dari siswa – siswi yang sedang menempuh pendidikan dan juga dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya selaku pelaksana pendidikan telah melakukan berbagai upaya agar warganya dapat bersekolah setinggi – tingginya. Pemerintah Kota Surabaya juga menyiapkan pendidikan gratis.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil temuan dilapangan selama proses penelitian dan telah disajikan dan dianalisis serta diinterpretasi pada bab sebelumnya. Pada bagian ini pengambilan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang berdasarkan pada seluruh hasil penelitian yang dilakukan seluruhnya, baik melalui wawancara, maupun penemuan data dan pengambilan data dan pengolahan data yang dilakukan selama proses penelitian. Dengan kata lain adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan maka pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk wujud tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah Kota Surabaya untuk dapat mensejahterakan warganya dan juga memberi akses pendidikan seluas – luasnya bagi warganya, tanpa ada mana yang mampu dan yang

miskin. Dan juga dengan berpendidikan tinggi maka para anak yang berasal dari keluarga miskin akan dapat membantu orang tuanya dari segi ekonomi keluarga.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2012. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2003. *Dasar - Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Badan Pusat Statistik.. *Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2013*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik.. *Surabaya Dalam Angka Tahun 2011, 2012, 2013*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.

Dunn, Willian N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Karnaji, bagong Suyanto. 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial : Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin* Jakarta : Airlangga University Press

Widodo, Joko. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.